

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut kedaulatan kepada rakyat dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi. Pemilu adalah elemen penting demokrasi yang menjadi salah satu indikator kualitas keberjalanan demokrasi (Darumurti dan Sulaksono 2014). Di Indonesia sendiri pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali, demokrasi memiliki kaitan yang begitu erat dengan pemilu, namun pengkaitan pemilu dengan demokrasi tersebut hanya dapat dilakukan saat pemilu yang akan dilakukan dapat mencerminkan kebebasan politik rakyat dan menghasilkan sebuah sirkulasi di dalam kekuasaan (Puspitasari 2004). Dalam demokrasi tidak langsung atau perwakilan, demokrasi menuntut adanya pertanggung jawaban bagi mereka yang mewakili suara yang diwakilkan. Di dalam jurnal Demokrasi dan Demokratisasi, demokrasi dapat ditandai dengan adanya tiga syarat antara lain: adanya kompetisi atau proses pergantian kekuasaan secara periodik, keterlibatan masyarakat, dan perlindungan atas hak-hak sipil. Pemilu menjadi wadah untuk merepresentasikan tiga ciri tersebut. Demokrasi menuntut adanya sebuah kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam proses-proses politik.

Salah satu aspek paling penting pada negara demokrasi yaitu partisipasi politik. Jalannya pemerintahan sangat dipengaruhi oleh adanya sebuah partisipasi politik, partisipasi politik merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam demokrasi *cornerstone of democracy*, akan tetapi adanya partisipasi masyarakat secara

langsung di dalam proses politik masih memiliki ambivalensi (Subekti et al. 2014). Partisipasi politik masyarakat pada saat ini tidak dapat terlepas dari kondisi dan sistem politik yang sedang berjalan di negara tersebut. Hingga saat ini sistem politik di Indonesia telah berulang-kali mengalami perubahan, yang dimulai dari pasca kemerdekaan hingga saat ini. Banyak masyarakat yang beranggapan mengenai reformasi yang dirasakan sebagai masa yang lebih demokratis. Pilkada menjadi bagian dari penataan struktur kekuasaan negara dalam wujudnya menciptakan mekanisme kontrol dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam praktiknya, pilkada tidak hanya memiliki tujuan untuk memaksimalkan proses demokrasi di daerah, akan tetapi juga mendorong terwujudnya prinsip otonomi daerah seluas-luasnya (Yusup 2016). Masyarakat sendiri memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat. Hak tersebut antara lain (KPU Blora 2020):

- a. Memperoleh informasi publik mengenai pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat menyampaikan dan menyebarkan informasi publik yang berkaitan dengan pemilihan.
- c. Berpendapat maupun menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan.
- d. Ikut serta dalam proses penyusunan sebuah kebijakan atau peraturan Pemilihan;
- e. Ikut serta dalam segala tahapan pemilihan.
- f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan.

- g. Melakukan konfirmasi yang berasal hasil pengawasan atau pemantauan dalam pemilihan.
- h. Memberi usulan tindak lanjut mengenai hasil pengawasan maupun pemantauan pemilihan.

Kewajiban yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat antara lain(KPU Blora 2020):

- a. Menghormati adanya hak orang lain.
- b. Bertanggung jawab atas segala pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi.
- c. menjaga terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PKPU No. 8 Tahun 2017.
- d. menjaga etika dan sopan santun yang berdasarkan budaya masyarakat.

Pemilih pemula sendiri memiliki beberapa pengertian pada saat ini.

Pemilih pemula dapat dipahami sebagai warga yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Di Indonesia sendiri warga negara yang dinyatakan memiliki hak pilih harus telah berumur genap 17 tahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam No. 10 Tahun 2008. Pemilih pemula di Indonesia memiliki jumlah yang signifikan dalam kalkulasi suara politik. Pemilih di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga jenis: pertama pemilih yang rasional yang memilih berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih (Rahmat and Esther 2016).

Desentralisasi adalah hasil dari reformasi karena pada awalnya pada zaman orde baru semua proses pemerintahan dipegang oleh pemerintah pusat atau sentralisasi, desentralisasi diatur di UU no 32 Tahun 2004 dan direvisi menjadi UU no 23 Tahun 2014. Desentralisasi dapat dipahami sebagai bentuk transfer kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur wilayah otonimya secara mandiri. Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang dan mengatur pilkada serentak nasional.

Sejak tahun 2015, pengaturan mengenai penyelenggaraan pilkada mengalami perubahan, yakni diselenggarakan secara serentak. Dalam praktiknya, hal itu dilakukan bertahap. Pertama, pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yang diikuti oleh 271 daerah yang terdiri 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota. Kedua, pilkada serentak pada Februari 2017 yang dilaksanakan di 99 daerah, terdiri dari 8 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Juni 2018 diikuti 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi dan 154 kabupaten/ kota, dan keempat pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 2020. Sedangkan, pada tahun 2024 nanti akan dilaksanakan pilkada serentak secara nasional.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah merupakan sesuatu hal yang penting, termasuk dalam memilih kepala daerah. Sesuai hasil reformasi pemerintahan yang menganut demokrasi langsung maka pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan secara langsung, di mana rakyat diberi hak untuk memilih langsung kepala daerahnya baik tingkat provinsi maupun kota/ kabupaten. Di masa pandemi saat ini telah merubah hampir semua kegiatan masyarakat tidak halnya merubah kegiatan partisipasi

politik yang dilakukan masyarakat. Masyarakat merasa was was dengan adanya PILKADA ini karena banyak yang berpendapat bahwa kegiatan ini dapat menyebabkan cluster terbaru penyebaran virus Covid-19. Dalam menyukseskan pemilihan Kepala Daerah , KPUD telah menyiapkan berbagai hal dari masa pendaftaran calon, masa kampanye, pembentukan KPPS, persiapan hari pencoblosan, dan rekapitulasi penghitungan suara agar semua kegiatan aman dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi tidak semua masyarakat merasa aman akan hal tersebut karena kondisi lapangan serta mindset orang-orang berbeda. Banyak hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam pilkada serentak 2020 ini. Pertama, konteks politik. Ini berkaitan dengan latar belakang politik kandidat. Kedua, lanjutnya, berhasil atau tidaknya penyelenggara pemilu meyakinkan pemilih bahwa aman untuk mereka datang ke TPS. Ketiga, mengenai informasi. Apakah informasi mengenai bagaimana cara memilih, syarat untuk bisa menggunakan hak pilih, bahkan kapan hari H pemungutan suara dan di mana TPS dia terdaftar sudah berjalan secara maksimal.

Pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia beberapa tahun silam telah mempengaruhi banyak hal, termasuk pelaksanaan pilkada pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mengalami penundaan. Penundaan pilkada itu sempat memicu perdebatan sengit, utamanya berkaitan dengan dampak-dampak yang muncul. Namun, akhirnya penyelenggaraan pilkada dilakukan pada tahun yang sama. Indonesia tetap menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 pada 9 Provinsi dengan rincian 224 kabupaten dan 37 kota. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 21

kota/kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak 2020, salah satunya yaitu kabupaten Blora dengan total penduduk 848,369 Jiwa. Pada masa pilkada sendiri untuk kasus covid-19 sangatlah tinggi bahkan di setiap kawasan kabupaten Blora masuk dalam zona merah. Akan tetapi masyarakat kabupaten Blora sendiri perilaku partisipasinya masih Di kabupaten Blora sendiri perilaku partisipasinya masih mudah untuk dimobilisasikan, dalam hal ini masyarakat mengakui bahwa ada hal yang mempengaruhi mereka adalah disuruh atau diajak orang lain untuk memilih calon tertentu dan karena diberi sejumlah uang untuk memilih calon yang diharapkan.

Berdasarkan data dari KPUD Kabupaten Blora dalam gelaran lima tahunan ini adalah partisipasi Pemilih pada Pilbup tahun 2020 mencapai 77,47%. Prosentase tersebut diperoleh dari data jumlah pemilih yakni Pemilih dalam DPT sebanyak 700.995 dan 1.451 orang pemilih tambahan (DPTb) tercatat hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak 544.183 orang. Angka ini merupakan capaian partisipasi Pemilih tertinggi selama penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Blora, baik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Perlu dicatat bahwa partisipasi Pemilih pada Pilbup sebelumnya (2015) adalah 71,6%, kemudian 71,7% pada 2010, dan 74,6% pada 2005. Sedangkan pada pergelaran Pilgub tahun 2018 adalah 62,8%, kemudian 55,9% pada 2013, dan 61,7% pada 2008. KPU Blora sendiri menargetkan angka partisipasi pada Pilbup 2020 sebanyak 77,5%. Yang ini berarti capaian tersebut masih sedikit dibawah target. M. Syaiful Amri, anggota KPU Blora Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat menjelaskan “capaian angka

partisipasi kita masih sekitar 0,03% di bawah target. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan demikian, salah satunya adalah masih adanya ketakutan Pemilih untuk datang ke TPS dikarenakan takut tertular covid-19”(KPU Blora 2020). Walaupun begitu tingkat partisipasi didalam pemilihan Bupati di Kabupaten Blora sendiri diatas rata rata dari tingkat partisipasi Pilkada serentak di Jawa Tengah dengan rata-rata 74,34%. Jumlah partisipasi masyarakat Blora jauh lebih tinggi dari pada kabupaten tetangganya yaitu Kabupaten Grobogan dengan jumlah partisipasi 63%.

Data partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan di Kabupaten Blora dari tahun ke tahun.

Tabel I.1 Data Pemilihan Tiap Tahun

NO	Jenis Pemilihan	Tahun	Jumlah Pemilih	Presentase pemilih
1	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Blora	2013	704.896	55,88%
2	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	2014	704.487	71.61%
3	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora	2015	706.604	71.59%
4	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Blora	2018	690.823	62.85%
5	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Blora	2019	713.512	80.42%
6	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora	2020	702.698	77.44%

Sumber: KPU Kabupaten Blora

1.2 Rumusan Masalah

Faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pilkada serentak pada masa pandemi di Kabupaten Blora tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukenali berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilkada serentak di Kabupaten Blora tahun 2020 walaupun diterpa dengan adanya pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

1. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi terhadap penelitian berikutnya bagi mahasiswa mengenai tingkat partisipasi politik dan faktor yang mempengaruhi dalam PILKADA terutama dalam PILKADA serentak.
2. Penulis berharap dari hasil penelitian ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di keadaan keadaannya apapun.
3. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan dalam kondisi pandemi atau force majeure.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Kajian yang ditulis oleh Siti Khikmatul Rizqi dengan judul 'Partisipasi Politik Masyarakat dalam PILKADA 2017 di Kabupaten Yarimo, Papua,

Indonesia', menemukan bahwa ada beberapa isu yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam Pilkada. Ketidakpercayaan masyarakat kepada Komisi PILKADA atau KPU (Komisi Pemilihan Umum), ketidakpercayaan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, ketidakpercayaan janji pemilu, ketidakpedulian terhadap visi dan misi yang ditawarkan, pendidikan politik pemilih, pemberian kandidat atau kebijakan moneter kepada pemimpin terpilih, dan kesiapan KPU yang belum memadai untuk menyelenggarakan pilkada (Rizqi 2018).

Selain itu, terdapat penelitian Eta Yuni Lestari dan Nugraheni Arumsari berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang”, yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon walikota Semarang. , kejelasan dan pemutakhiran visi dan misi kandidat dalam pemilu, latar belakang kandidat (tingkat pendidikan, agama), faktor sosial atau kedekatan dengan komunitas kandidat, kinerja kandidat yang luar biasa sebagai mantan walikota (calon incumbent), prestasi kerja, kandidat rekam jejak, faktor kepribadian (jujur, amanah, kerakyatan, tidak pernah terlibat dalam litigasi)(Lestari and Arumsari 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ghaustauf Anas Mahendra berjudul “Partisipasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Blora”, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi terkait dengan perbedaan kepentingan calon terkait digambarkan sebagai terkait dan kemudian terkait. Faktor selanjutnya yang menyebabkan masyarakat tidak begitu mengenal seorang kandidat adalah terkait dengan struktur kandidat. Struktur sosial, terutama dengan struktur sosial masyarakat di tingkat pedesaan, juga

mempengaruhi minat masyarakat terhadap TPS. Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat sangat rendah, terutama di pedesaan, sehingga kesadaran politik juga rendah, faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap objek politik. Ada calon yang menerima uang (dana politik), dan kemudian oleh mereka Asumsikan Anda terpilih. (Mahendra, 2019).

Kajian berjudul Pembatasan Kampanye dan Partisipasi Pemilih Rendah di Tiga Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan 2015 yang ditulis oleh Andi Ayatullah Ahmad, Hafied Cangara, dan Hasrullah menemukan tiga pilkada digelar, katanya partisipasi pemilih di daerah itu rendah. Meski bukan karena pembatasan kampanye, namun lebih dominan karena jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) membengkak. Faktor lainnya adalah kejenuhan masyarakat pasca berbagai peristiwa pemilu. Publik acuh tak acuh terhadap pelaksanaan Partai Demokrat, dengan asumsi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian sikap pragmatis masyarakat yang hanya ingin mencoblos ketika ada imbalan yang signifikan, dan faktor teknis lainnya seperti tidak terdaftar di DPT (Ahmad, Cangara, and Hasrullah 2018).

Dalam penelitian yang berjudul Prospek Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Malang yang diedit oleh Yustinus Usfinit dkk, diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi penduduk Kota Malang dalam Pilkada 2013. Walikota menjelaskan: Faktor lingkungan merupakan salah satu dari 4.444 faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat serta partisipasi politik di kota Malang. Partisipasi pemilih warga kota Malang pada Pilkada 2013 sangat tinggi karena merupakan mayoritas

penduduk asli dan memiliki rasa memiliki yang sangat kuat terhadap lingkungan.

- Jumlah TPS. Ini adalah pengalaman baru bagi pendatang baru dan mereka ingin tahu bagaimana rasanya terlibat langsung dalam pemilihan daerah. Warga Kota Malang merasa berkewajiban mensukseskan pemilihan Bupati Kota Malang. Kebijakan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan walikota tahun 2013 (Usfinit, Suprojo, and Setyawan 2014).

Dalam kajian Lita Tyesta A.L yang berjudul Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia, partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 di Sulsel mengalami penurunan. lebih jauh. Faktor sosial, politik, administrasi, pendidikan, budaya, pekerjaan dan faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat belum setinggi itu karena masih sangat kurang tersosialisasikan upaya penguatan Partisipasi dengan meningkatkan regulasi serta melibatkan pemangku kepentingan yang ada dan mempromosikan sosialisasi (Lita, 2017).

Kajian Sri Junirti Hasibuan dkk yang berjudul Strategi KPU Sumut Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilgub Sumut 2018 merupakan kajian tentang peningkatan partisipasi masyarakat di Sumut.Strategi KPU Sumut menyatakan: Pemilihan gubernur 2018 sangat penting, terorganisir dan beragam. Dari tujuan jangka panjang, terlihat bahwa KPU Sumut sudah memiliki rencana sendiri dan melaksanakan program yang sangat berbeda yang ditujukan untuk menjangkau lapisan masyarakat. Inovasi program juga telah dilakukan KPU untuk meningkatkan proporsi pemilih di Sumut. Kendalanya sendiri terletak pada alokasi sumber daya manusia yang menurut KPU sangat terbatas, terutama di

daerah. Tentu hal ini menghambat kinerja KPU dan juga menjadi masalah keuangan bagi KPU (Hasibuan 2019).

“Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Citaro pada Pilkada 2018” oleh Atika M.I. Salindejo menjelaskan tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Citaro ditopang oleh beberapa faktor. Dengan kata lain, antusiasme yang tinggi mengarah pada pemikiran kritis tentang implementasi dan tingkat minat partisipasi yang tinggi. Dalam proses pemilu, informasi yang berjalan lancar dan menjadi sarana sosialisasi politik. Prestasi KPUD di tingkat Pilkada Departemen Citaro dalam melakukan kampanye proaktif untuk memajukan kepentingan pemilih individu sangat besar. Hal ini akan memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang tujuan penyelenggaraan pilkada dalam menentukan kepemimpinan lokal. (Salindeho 2018).

Kajian yang dilakukan oleh Andre M. Fikri, Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 menemukan, partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada Payakumbuh 2017 didorong oleh dua faktor.jelasnya. Hal, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah bagaimana keadaan self handicap dalam memahami pilkada kota payakumbuh. Dalam hal ini penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PDDI) sebenarnya sudah memiliki pandangan yang baik, seperti mencoblos di Pilkada Kota Payakumbu, namun faktor eksternal tidak mendukung hal tersebut dan Indonesia tidak menarik minat masyarakat selain penyandang disabilitas. cacat. Pihak penyelenggara, KPUD, tidak mau mendukung angka partisipasi penyandang disabilitas dalam Pilkada

Payakumbuh karena faktor eksternal, dan merasa tidak terbebani untuk menaikkan angka partisipasi, sehingga melibatkan PPDI (Fikri 2019).

Kajian terbaru oleh Inggried Fena Meyliana dan Dewi Erowati berjudul Mengukur Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 menemukan bahwa partisipasi dalam pemilu di Kabupaten Tana Toraja erat kaitannya dengan kesadaran politik dan pemerintahan. tentang kepercayaan pada Terpengaruh. Masyarakat kurang memahami hak dan kewajibannya dalam kegiatan Pilkada, karena pemilih hanya menggunakan hak pilihnya berdasarkan faktor keluarga, agama dan status sosial. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersumber dari buruknya penanganan kerusuhan Pilkada 2010, dan ada yang trauma dengan menggunakan hak pilihnya. Partisipasi dalam Pilkada Tana Toraja diproyeksikan menurun pada tahun 2020 karena masyarakat takut mengikuti TPS dan memilih untuk tetap sehat. Selain itu, penurunan kehadiran tersebut bisa disebabkan oleh faktor cuaca saat pencoblosan berlangsung pada Desember saat Pilkada 2020 terlihat di Kabupaten Tana Toraja (Meyliana and Erowati 2020).

Dari 10 penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah identifikasi kasus, yaitu lokalisasi serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di tingkat nasional. Kajian tersebut meragukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berada dalam kondisi pandemi Covid-19 pada saat Indonesia menyelenggarakan pemilihan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan investigasi terhadap faktor-faktor pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Brola pada masa pandemi

Covid-19 2020, dengan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

1.5.2 Landasan Teori

Pemilu menjadi instrumen penting dalam menjalankan demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diakui sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala (Nurhamidah 2014). Menurut Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pemilu merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung (Rismayanti 2020). Tidak jauh berbeda dari itu, Dedi Mulyadi (Mahendra.2019) memperjelas makna pemilu sebagai mekanisme politik untuk memilih pemimpin dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan Paimin Napitupala memberikan pengertian pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan inspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah (Mahendra.2019). Dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan prosedur dalam suatu sistem yang bekerja dengan baik, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan elektual bahkan menjadi representative government, yang didalamnya melibatkan begitu banyak organisasi baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah, yang dapat dilihat dari infrastruktur pemerintah bahkan suprastruktur pemerintah, yang mutlak didalamnya harus memuat kemampuan dalam mengatur input menjadi proses output yang baik dan nantinya dapat digunakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh seluruh masyarakat yang nantinya juga tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang

baik.

Partisipasi politik (Salindeho 2018) adalah suatu kegiatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok berkaitan dengan proses-proses kebijakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada sisi lain, keterlibatan itu diperluas dalam ranah kehidupan berupa partisipasi politik masyarakat. Almond dalam (Putri Yolanda and Halim 2020) membagi partisipasi politik menjadi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Secara konvensional, partisipasi politik dapat dipahami dalam bentuk pemungutan suara, diskusi politik, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan politik, serta memiliki komunikasi anarpribadi dengan pejabat publik. Sedangkan secara non konvensional partisipasi dilakukan dalam situasi yang di luar normal bahkan tidak jarang ilegal yang disertai dengan kekerasan dan cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar (revolusioner).

Menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

1) Modernisasi Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern

Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

5) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Menurut Milbarth dalam (Febriantanto 2019) Faktor pendorong partisipasi politik terdapat lima unsur yaitu:

1) Perangsangan politik yang dapat timbul dari adanya diskusi baik formal maupun informal.

2) Faktor karakteristik pribadi seseorang seperti halnya adalah watak kepedulian sosial seseorang.

3) Faktor karakteristik sosial yang merupakan faktor status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang dalam beraktivitas.

4) Faktor situasi atau lingkungan politik yang merupakan faktor dimana keadaan lingkungan sosial sekitar seseorang pemilih yang baik dan kondusif sehingga berkemaun dalam partisipasi politik

1.5.3 Operasionalisasi Konsep

Partisipasi Politik Menurut Suryadi dalam (Hertanto 2021) yaitu mendefinisikan partisipasi politik dengan lingkup yang lebih sempit dimana

partisipasi politik adalah keterlibatan secara langsung masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Terdapat faktor pendorong adanya partisipasi politik menurut Milbarth dalam (Febriantanto 2019) yaitu adanya perangsangan politik, faktor karakteristik pribadi, karakteristik sosial, keadaan situasi. Ada teori lainnya yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pilkada serentak pada masa pandemi di Kabupaten Blora tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian campuran, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan survei kuesioner.

Tabel I.2 Operasionalisasi Konseptual Model Milbart

Operasionalisasi Konseptual	Aspek	Indikator
Faktor pendorong adanya partisipasi	Perangsang politik merupakan kepekaan pemilih agar bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik serta keaktifan masyarakat dalam mengakses media massa.	Kegiatan Sosialisasi Ikut adil dalam organisasi Pengaruh media massa
	Karakteristik merupakan dimana kondisi seseorang	Pribadi faktor pribadi dapat Watak dari seorang yang dipilih

mempengaruhi kegiatan politik. dalam Keikutserataan calon dalam politik/ Keaktifan calon dalam berpolitik. Perasaan emosional pemilih meliputi rasa simpati atau kepedulian pemilih untuk terlibat dalam politik

Hubungan Pribadi Hubungan Pribadi

Latar belakang calon

Karakteristik Sosial: Status sosial
Menyangkut status ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Keadaan ekonomi
Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik. Ras atau Etnis
Agama

Faktor situasi , kondisi keadaan sekitar
Lingkungan politik yang yang sedang terjadi,
kondusif membuat serta kondisi lingkungan
orang dengan senang dalam aktivitas politik.
hati berpartisipasi dalam
kehidupan politik.
Dalam lingkungan
politik yang demokratis
orang merasa lebih
bebas dan nyaman untuk
terlibat dalam aktivitas-
aktivitas politik dari
pada dalam lingkungan
politik yang otoriter.
Lingkungan politik yang

sering diisi dengan Kondisi geografis
aktivitasaktivitas brutal wilayah
dan kekerasan dengan
sendirinya menjauhkan
masyarakat dari wilayah
politik.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method research*) yaitu metode penelitian yang mengelaborasi metode kualitatif dan kuantitatif dalam proses penelitian (John Creswell .2011). Metode ini lebih kompleks karena

melibatkan dua fungsi metode yang berbeda secara kolektif. Tipe *mixed method* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi eksploratoris sekuensial yang lebih mendahulukan data kualitatif kemudian diiringi dengan pengolahan data kuantitatif (John Creswell .2011) Penelitian ini dilakukan dengan mengakumulasi serta menganalisis data kualitatif lebih dahulu, kemudian pengolahan data kuantitatif berdasarkan pada data yang diperoleh pada tahapan awal.

Tipe eksploratoris digunakan untuk mendukung dan menyempurnakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini. Metode ini digunakan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula di Pilkada Serentak Kabupaten Blora tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Blora yang dimana terletak di Provinsi Jawa Tengah. Subjek utama dalam penelitian ini adalah pemilih pemula dalam Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020 tahun pada tahun 2020. Peneliti mengumpulkan segala informasi dari pemilih pemula dengan acuan teori yang digunakan saat penelitian.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan beberapa model pengumpulan data diantara lain adalah:

1.6.2.1 Observasi

Melalui teknik ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yang dipilih. Hasil pengamatan dicatat secara sistematis sehingga dapat membantu peneliti untuk dapat memahami dengan lebih mendalam konteks politik yang sedang berlangsung selama penelitian ini dilakukan. Dengan adanya observasi ini

digunakan untuk cek dan ricek terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dalam mendukung keabsahan data yang diperoleh. Pada saat melakukan observasi banyak menemukan fenomena dan jawaban yang beragam dari para pemilih pemula diluar teori yang digunakan.

1.6.2.2 Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data utama dalam penelitian ini. Terdapat cukup banyak pihak yang menjadi informan wawancara dalam penelitian yang dilakukan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Mohamad Khamdun, S.Pd.I (Ketua Divisi Keuangan, Umum Dan Logistik KPU Kabupaten Blora)
2. Bapak Mohammad Moh. Syaiful Amri, S.IP .(Anggota Divisi Partisipasi Pemilih Dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Blora)
3. Bapak Sumali (Pensiunan POLRI)
4. Saudara Sri Aji Rizky (Pemilih Pemula 20 Tahun)
5. Saudara Wahyu Hakim (Pemilih Pemula 20 Tahun)
6. Saudari Tiara Galuh Pratiwi (Pemilih Pemula 19 Tahun)
7. Saudari Ilman Nafiah (Pemilih Pemula 19 Tahun)
8. Saudari Arum Puspitasari (Pemilih Pemula 18 Tahun)
9. Saudara Hatta Acarya Wiraraja (Pemilih Pemula 18 Tahun)
10. Saudara Jerimies Hedytama (Pemilih Pemula 18 Tahun)

Dalam tahapan ini peneliti kesulitan untuk mendapatkan data dari pemilih pemula yang berasal dari golongan orang yang memiliki hak pilih karena sudah menikah dibawah umur 17 tahun, pemilih pemula yang tergolong di kriteria

tersebut sulit untuk ditemui serta tidak ada data yang pasti dan purnawirawan polisi dan TNI karena mereka tidak bisa langsung memilih setelah dinyatakan sudah pensiun, mereka harus mengurus berkas-berkas untuk dapat mengikuti kegiatan pemilihan. Oleh karena ini peneliti melakukan wawancara terhadap 2 orang dari pihak KPU kabupaten Blora, 7 responden pemilih pemula yang berasal dari kategori umur, dan 1 responden yang berasal dari purnawirawan polisi dan TNI.

1.6.2.3 Survei Kuesioner

Dalam mendapatkan data utama melalui metode kuantitatif, peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian setelah mendapatkan data kualitatif. Kuesioner tersebut berisikan daftar pertanyaan ataupun pernyataan yang telah disusun secara sistematis. Jenis kuesioner yang digunakan adalah langsung tertutup, jenis ini terdapat pilihan jawaban dalam lembar kuesioner yang telah ditentukan peneliti. Guna memperkuat data perlu adanya penyebaran kuesioner yang disebar kepada pemilih pemula di Kabupaten Blora, untuk mempersingkat waktu dan efektifitas peneliti menggunakan Google Form dalam penyebaran kuesioner.

1.6.2.4 Dokumentasi

Selain terjun ke lapangan, peneliti juga memanfaatkan beberapa sumber sekunder untuk memperkuat analisa dalam penelitian ini. Data-data tersebut bersumber dari berbagai jurnal, artikel, buku, media cetak ataupun elektronik serta laporan dokumen pemerintah. Untuk mendapatkan data peneliti dapat mengambil data yang mungkin tidak diungkapkan partisipan dalam proses wawancara.

1.6.2.5 Variabel dan Pengukuran

Variabel merupakan elemen dari penelitian, yang mana elemen tersebut mempunyai beragam nilai berbentuk kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah nilainya. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu variabel yang berdasarkan pada hubungan, lebih jelasnya dijelaskan di bawah ini:

1. Variabel Bebas

Variabel bebas (Independent Variable) atau independen adalah variabel yang menjadi sebab ataupun yang mempengaruhi variabel lainnya yaitu variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas ini dianggap sebagai penyebab atas kehadiran variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat (Dependent Variable) atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi ataupun variabel yang mendapatkan efek ataupun resultan yang diakibatkan oleh variabel bebas. Variabel dependen ini menjadi variabel yang akan dijabarkan secara mendalam dan dituangkan dalam analisa Bab III. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah partisipasi politik pemilih pemula di Pilkada Kabupaten Blora Tahun 2020.

1.6.3 Populasi dan Sampel Penelitian.

Populasi adalah wilayah generalisasi objek/subjek penelitian dengan ciri tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah 67.425 orang yang tergolong pemilih pemula

di Kabupaten Blora. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Sampel ditarik untuk membuat batasan yang tegas dalam populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui rumus slovin dengan nilai signifikansi sebesar 10%. Dalam mempermudah pengambilan sampel peneliti perlu menggunakan penentuan jumlah sampel yang sudah tertuang dalam rumus slovin ini yang kemudian dapat digunakan dalam penguatan data sebelumnya.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai signifikansi

Diketahui bahwa jumlah populasi pemilih pemula Kabupaten Blora tahun 2020 berjumlah 67.425 orang dan penelitian ini menggunakan nilai signifikansi 10% (0,1), sehingga banyak sampel adalah:

$$n = \frac{67.425}{1 + 67.425 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{67.425}{675,25} = 99,851$$

Berdasarkan hasil penghitungan diatas sampel yang diambil berjumlah 99,851 yang akan digenapkan menjadi 100 orang pemilih pemula yang ikut dalam pilkada Kabupaten Blora tahun 2020. Sampel mewakili populasi dengan karakteristik penelitian. Penelitian ini menggunakan *Accidental Sampling* atau yang biasa disebut *sampling insidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan/insidental, artinya siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009). Peneliti membagi perdaerah secara rata dengan memberikan form dari orang ke orang lain.

1.6.4 Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah konvensi yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang interval pendek suatu alat ukur sehingga alat ukur tersebut memberikan data kuantitatif (Sugishirono, 2009). Penulis secara khusus mendefinisikan variabel survei dan memasukkannya ke dalam kuesioner/daftar kuesioner. Penulis menggunakan dua skala, skala Likert dan skala Guttman. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Kemudian gunakan skala Gutmann untuk mendapatkan jawaban pasti untuk masalah tertentu (Sugiyono, 2009).

1.6.5 Pengolahan Data

1.6.5.1 Editing

Kegiatan memeriksa atau memilih jawaban responden. Hasil jawaban jawaban kuesioner yang telah disebarkan oleh responden, merupakan data yang kemudian diolah menjadi informasi. Proses pengolahan data melalui fase editing yaitu mengumpulkan, memeriksa data, apakah sudah lengkap atau tidak, terjadi kesalahan mengisi, kesalahan mencatat atau kesalahan mencari tanda. Peneliti mengoreksi hasil jawaban yang diberikan oleh responden apakah ada indikator yang terlewat atau tidak.

1.6.5.2 Coding

Setelah tahap editing selesai, data tersebut direfleksikan dalam tanggapan responden untuk memudahkan analisis data. Pemberian kode dengan menetapkan nilai skor atau bobot terhadap hasil tanggapan angket, bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun data dalam bentuk daftar (membuat tabel data). Respon terhadap skor angket untuk masing-masing variabel, yang terdiri dari nomor urut responden, item pertanyaan, dan skor total item masing-masing responden.

1.6.5.3 Tabulasi

Tabulasi adalah menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk tabel-tabel. Kegiatan menyusun data dalam bentuk tabel guna mendapatkan data yang lebih ringkas. Adapun tahapannya adalah memasukkan data yang diperoleh dan telah dikelompok-kelompokkan dalam tabel induk kemudian tabel tersebut disajikan dan diuji. Peneliti melakukan perhitungan hasil yang kemudian dianalisis untuk memperoleh temuan dan kesimpulan penelitian.

1.6.5.4 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan setelah data terkumpul dari seluruh responden atau sumber data lainnya. Kegiatan analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menggabungkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data untuk setiap variabel yang diteliti, dan melakukan komputasi untuk menjawab dan menguji hipotesis yang diajukan (Sugishirono, 2009). Survei dilakukan secara kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif. Semua data diolah dengan program asisten komputer SPSS

versi 20.0 for Windows. SPSS adalah sebuah software program pengolah data yang biasa digunakan untuk mengolah data statistik. Program pengolahan data SPSS ini membantu penulis dalam mengolah data dan memungkinkan penulis memperoleh hasil pengolahan data secara akurat, terlacak, dan terpercaya.